1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1.1. Perkembangan Inflasi Umum Triwulan III 2026

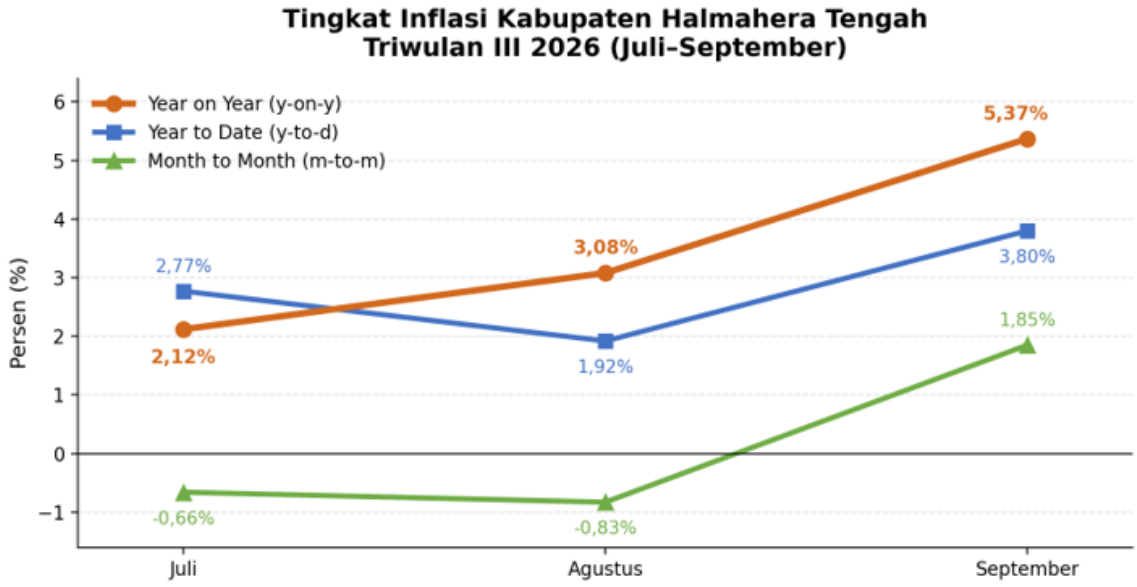
Selama Triwulan III Tahun 2026 (Juli–September), inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Halmahera Tengah terus meningkat dan mencapai puncaknya di akhir triwulan. Inflasi y-on-y tercatat 2,12 persen pada Juli 2026, naik menjadi 3,08 persen pada Agustus 2026, kemudian melonjak menjadi 5,37 persen pada September 2026 — level tertinggi sepanjang Januari–September 2026 (sebelumnya tertinggi 3,11 persen pada Juni 2026). Peningkatan ini sejalan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 sebesar 113,28, dibandingkan 107,51 pada September 2025.

Berbeda dengan Triwulan II yang bergerak naik secara konsisten, pergerakan harga bulanan pada Triwulan III berlangsung dalam dua fase. Pada Juli dan Agustus 2026, terjadi deflasi month to month (m-to-m) masing-masing 0,66 persen dan 0,83 persen, terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (andil deflasi m-to-m 0,80 persen pada Juli dan 0,73 persen pada Agustus). Pada September 2026, tren berbalik menjadi inflasi m-to-m 1,85 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi penyumbang terbesar (andil 1,68 persen). Inflasi kumulatif tahun berjalan (year to date/y-to-d) tercatat 2,77 persen (Juli), 1,92 persen (Agustus), dan 3,80 persen (September).

Kenaikan inflasi y-on-y sepanjang triwulan juga dipengaruhi efek basis tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025 terjadi deflasi m-to-m 1,75 persen — jauh lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus 2026 sebesar 0,83 persen — dan inflasi y-on-y Agustus serta September 2025 tercatat negatif (-0,74 persen dan -1,21 persen). Akibatnya, inflasi y-on-y Agustus 2026 naik dari 2,12 persen menjadi 3,08 persen meskipun IHK secara bulanan turun. Efek ini terlihat dari IHK: pada periode Juli–September 2025 IHK turun dari 109,82 menjadi 107,51 (turun sekitar 2,1 persen), sedangkan pada periode yang sama tahun 2026 IHK naik dari 112,15 menjadi 113,28 (naik sekitar 1,0 persen; hasil perhitungan dari IHK BPS).

Bulan	IHK	Inflasi m-to-m (%)	Inflasi y-to-d (%)	Inflasi y-on-y (%)	Peringkat di Maluku Utara
Juli 2026	112,15	-0,66	2,77	**2,12**	Terendah
Agustus 2026	111,22	-0,83	1,92	**3,08**	Terendah
September 2026	113,28	1,85	3,80	**5,37**	Terendah

Berdasarkan infografis BPS, inflasi y-on-y Kabupaten Halmahera Tengah tetap menjadi yang terendah di Provinsi Maluku Utara pada setiap bulan Triwulan III 2026, di bawah Kota Ternate yang mencatat 4,35 persen (Juli), 5,75 persen (Agustus), dan 5,79 persen (September). Namun selisihnya menyempit tajam, dari 2,67 poin persentase pada Agustus menjadi hanya 0,42 poin persentase pada September.



1.2. Kelompok Pengeluaran Pendorong Utama

Inflasi y-on-y Triwulan III 2026 digerakkan oleh dua kelompok utama. Pertama, kelompok transportasi yang bertahan pada level tinggi dan kembali naik: dari 14,72 persen (Juli) dan 14,30 persen (Agustus) menjadi 16,69 persen (September). Sumber utamanya adalah subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi dengan inflasi y-on-y 21,51 persen (Juli), 21,07 persen (Agustus), dan 24,59 persen (September), yang didorong oleh bensin dan solar. Andil kelompok transportasi terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,42 persen (Juli), 1,40 persen (Agustus), dan 1,64 persen (September).

Kedua, dan menjadi pembeda utama dibandingkan Triwulan II, kelompok makanan, minuman, dan tembakau melonjak tajam: inflasi y-on-y 0,85 persen (Juli), 3,32 persen (Agustus), dan 8,46 persen (September), dengan subkelompok makanan mencatat 0,92 persen, 3,87 persen, dan 10,16 persen. Andil kelompok ini naik dari 0,36 persen (Juli) menjadi 1,37 persen (Agustus) dan 3,48 persen (September). Pada September 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau (3,48 persen) bersama transportasi (1,64 persen) menyumbang 5,12 persen dari total inflasi y-on-y 5,37 persen.

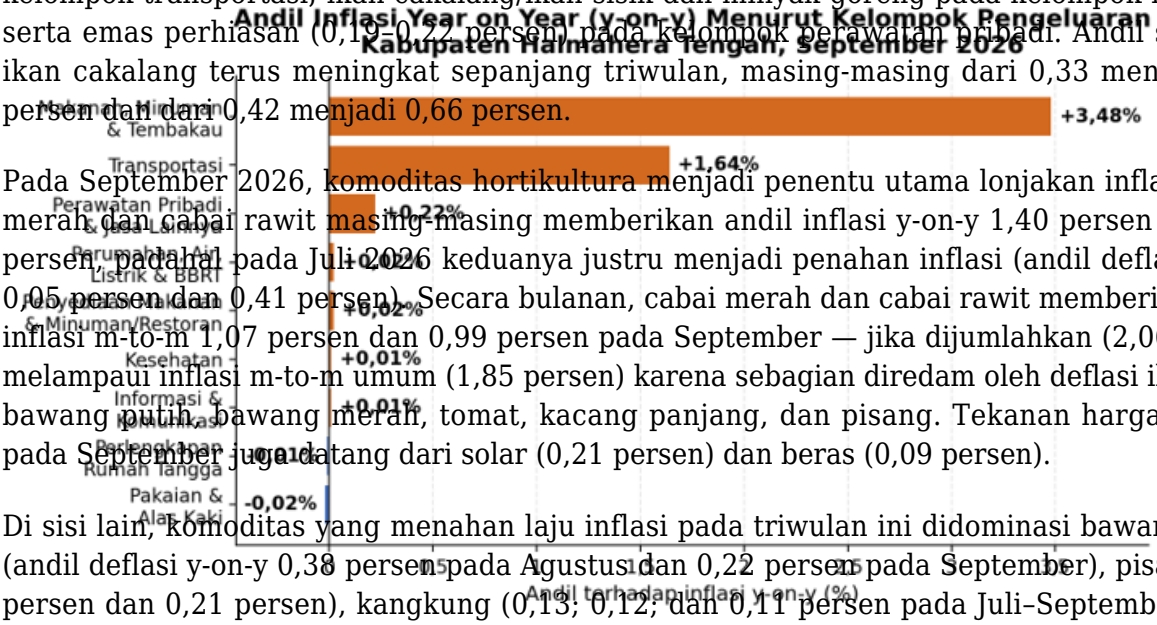
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang pada Triwulan II menjadi pendorong signifikan, relatif melandai dari 3,98 persen (Juli) menjadi 3,68 persen (Agustus) dan 3,01 persen (September), dengan emas perhiasan sebagai penyumbang utama. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tetap mengalami deflasi y-on-y dengan andil yang sangat kecil (tidak lebih dari 0,03 persen).

Kelompok Pengeluaran	y-on-y Juli (%)	y-on-y Agustus (%)	y-on-y September (%)
Transportasi	14,72	14,30	**16,69**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,85	3,32	**8,46**

Kelompok Pengeluaran	y-on-y Juli (%)	y-on-y Agustus (%)	y-on-y September (%)
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,98	3,68	3,01
Kesehatan	0,53	0,53	0,53
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,42	0,42	0,42
Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT	0,31	0,29	0,14
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	-0,44	-0,47	-0,20
Pakaian dan Alas Kaki	-0,17	-0,47	-0,47

1.3. Komoditas Dominan Penyumbang Inflasi dan Deflasi

Komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi y-on-y sepanjang Triwulan III 2026 adalah bensin (andil 1,03–1,04 persen) dan solar (0,32–0,55 persen) pada kelompok transportasi; ikan cakalang/ikan sisik dan minyak goreng pada kelompok makanan; serta emas perhiasan (0,19–0,22 persen) pada kelompok perawatan pribadi. Andil solar dan ikan cakalang terus meningkat sepanjang triwulan, masing-masing dari 0,33 menjadi 0,55 persen dan dari 0,42 menjadi 0,66 persen.



Pada September 2026, komoditas hortikultura menjadi penentu utama lonjakan inflasi. Cabai merah dan cabai rawit masing-masing memberikan andil inflasi y-on-y 1,40 persen dan 1,07 persen, padahal pada Juli 2026 keduanya justru menjadi penahan inflasi (andil deflasi y-on-y 0,05 persen dan 0,41 persen). Secara bulanan, cabai merah dan cabai rawit memberikan andil inflasi m-to-m 1,07 persen dan 0,99 persen pada September — jika dijumlahkan (2,06 persen) melampaui inflasi m-to-m umum (1,85 persen) karena sebagian diredam oleh deflasi ikan asap, bawang putih, bawang merah, tomat, kacang panjang, dan pisang. Tekanan harga bulanan pada September juga datang dari solar (0,21 persen) dan beras (0,09 persen).

Di sisi lain, komoditas yang menahan laju inflasi pada triwulan ini didominasi bawang merah (andil deflasi y-on-y 0,38 persen pada Agustus dan 0,22 persen pada September), pisang (0,15 persen dan 0,21 persen), kangkung (0,13; 0,12; dan 0,11 persen pada Juli–September), serta tomat. Deflasi m-to-m pada Juli bersumber dari cabai rawit (0,37 persen), cabai merah (0,22 persen), dan bawang merah (0,16 persen), sedangkan pada Agustus dari tomat (0,47 persen), bawang merah (0,20 persen), dan pisang (0,09 persen). Harga BBM bergerak berubah-ubah secara bulanan: bensin berandil inflasi m-to-m 0,35 persen pada Juli lalu berbalik deflasi 0,09 persen pada Agustus, sementara solar berandil deflasi 0,18 persen pada Juli dan inflasi 0,21 persen pada September.

Komoditas	Andil y-on-y Juli (%)	Andil y-on-y Agustus (%)	Andil y-on-y September (%)
Bensin	1,03	1,03	1,04
Solar	0,33	0,32	**0,55**

Komoditas	Andil y-on-y Juli (%)	Andil y-on-y Agustus (%)	Andil y-on-y September (%)
Ikan cakalang/ikan sisik	0,42	0,49	0,66
Minyak goreng	0,29	0,25	0,20
Cabai merah	-0,05	0,13	**1,40**
Cabai rawit	-0,41	–	**1,07**
Bawang merah	0,12	-0,38	-0,22
Emas perhiasan	0,22	0,21	0,19

1.4. Risiko ke Depan

- Risiko volatilitas harga cabai: Cabai merah dan cabai rawit memberikan andil m-to-m 1,07 dan 0,99 persen pada September 2026, berbalik dari posisi penahan inflasi pada Juli. Harga hortikultura sangat rentan terhadap cuaca serta gangguan pasokan dan distribusi. Jika tekanan berlanjut ke Triwulan IV, terlebih saat permintaan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru, inflasi y-on-y berpotensi bertahan tinggi.
- Risiko harga energi/BBM: Kelompok transportasi bertahan di atas 14 persen (y-on-y) sepanjang triwulan dan naik menjadi 16,69 persen pada September 2026. Andil solar meningkat dari 0,33 persen (Juli) menjadi 0,55 persen (September) dan solar mencatat inflasi m-to-m 0,21 persen pada September. Kenaikan BBM berpotensi merambat ke biaya distribusi dan harga barang lain.
- Risiko pangan pokok dan perikanan tangkap: Andil ikan cakalang/ikan sisik naik dari 0,42 persen (Juli) menjadi 0,66 persen (September), sementara beras mulai memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen pada September. Pasokan ikan yang dipengaruhi musim dan cuaca serta ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok perlu terus dipantau.
- Risiko efek basis dan akumulasi tekanan harga: IHK Desember 2025 (109,13) lebih tinggi sekitar 1,5 persen dibandingkan September 2025 (107,51), sehingga basis tahun lalu akan meningkat pada Triwulan IV. Secara aritmetika, jika IHK bertahan di level 113,28, inflasi y-on-y Desember 2026 berada di sekitar 3,80 persen; namun setiap kenaikan bulanan akan mendorongnya lebih tinggi lagi (hasil perhitungan dari IHK BPS).
- Risiko harga emas: Emas perhiasan konsisten berandil 0,19–0,22 persen dan berpotensi berfluktuasi mengikuti harga emas global.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Selama Triwulan III 2026 (Juli–September), inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Halmahera Tengah bergerak dari 2,12 persen pada Juli 2026, naik menjadi 3,08 persen pada Agustus 2026, dan melonjak tajam menjadi 5,37 persen pada September 2026 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,28. Angka September merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2026, melampaui puncak sebelumnya sebesar 3,11 persen pada Juni 2026, dan berada 1,87 poin persentase di atas batas atas sasaran inflasi nasional (2,5±1 persen atau 3,5 persen). Secara month to month (m-to-m), Halmahera Tengah mengalami deflasi 0,66 persen (Juli) dan 0,83 persen (Agustus), kemudian berbalik inflasi 1,85 persen pada September, sehingga inflasi year to date (y-to-d) mencapai 3,80 persen.

Berbeda dengan Triwulan II yang didominasi tekanan BBM, pada Triwulan III sumber tekanan bergeser ke kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Andil kelompok ini terhadap inflasi y-on-y meningkat dari 0,36 persen (Juli) menjadi 1,37 persen (Agustus) dan 3,48 persen (September), sehingga menjelaskan sekitar 96 persen kenaikan inflasi umum dari Juli ke September (3,12 dari 3,25 poin persentase). Tingginya angka y-on-y juga dipengaruhi efek basis (base effect): pada 2025 IHK Halmahera Tengah turun tajam pada Agustus (m-to-m −1,75 persen) dan September (−0,36 persen), sehingga inflasi y-on-y Agustus dan September 2025 tercatat negatif (−0,74 persen dan −1,21 persen). Meski demikian, lonjakan m-to-m 1,85 persen pada September 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga yang terjadi nyata dan bukan semata-mata efek statistik.

Tekanan tersebut berlangsung di tengah kondisi eksternal yang kurang kondusif, yaitu (i) konflik AS–Iran dan terganggunya Selat Hormuz yang mendorong harga minyak mentah Brent kembali menembus US$100 per barel pada September 2026, (ii) fenomena El Niño kategori kuat yang memicu kemarau lebih kering dan lebih panjang, serta (iii) pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.800–Rp17.900 per dolar AS. Pada tingkat nasional, inflasi y-on-y meningkat dari 2,88 persen (Juli) menjadi 3,19 persen (Agustus) dan 3,28 persen (September), dan Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan inflasi y-on-y tertinggi secara nasional pada Agustus 2026 (5,28 persen). Perbandingan inflasi disajikan pada tabel berikut.

Perbandingan inflasi y-on-y Triwulan III 2026 (persen)

Wilayah	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Kabupaten Halmahera Tengah	2,12	3,08	5,37
Kota Ternate	4,35	5,75	5,79
Nasional	2,88	3,19	3,28

Berdasarkan data BPS serta perkembangan ekonomi nasional dan internasional terkini, teridentifikasi beberapa permasalahan pokok pengendalian inflasi sebagai berikut.

1. Lonjakan harga cabai merah dan cabai rawit pada September 2026

Permasalahan yang paling mengemuka pada triwulan ini adalah lonjakan harga cabai pada September 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi y-on-y 0,85 persen (Juli), 3,32 persen (Agustus), dan 8,46 persen (September), dengan subkelompok makanan mencapai 10,16 persen pada September. Pada bulan tersebut, cabai merah dan cabai rawit memberikan andil y-on-y masing-masing 1,40 persen dan 1,07 persen, atau gabungan 2,47 persen yang setara sekitar 46 persen dari inflasi umum 5,37 persen. Secara m-to-m, andil cabai merah (1,07 persen) dan cabai rawit (0,99 persen) mencapai 2,06 persen, melampaui inflasi umum bulan itu (1,85 persen), sehingga komoditas lain secara agregat justru meredam inflasi.

Pola ini menunjukkan volatilitas yang ekstrem: pada Juli 2026 kedua komoditas masih menjadi penyumbang deflasi m-to-m (andil −0,37 persen untuk cabai rawit dan −0,22 persen untuk cabai merah), mulai berbalik naik pada Agustus (0,05 persen dan 0,04 persen), lalu melonjak pada September. Secara nasional, harga rata-rata cabai rawit naik 29,85 persen hingga pekan ketiga September 2026 menjadi Rp77.596 per kg, di atas Harga Acuan Penjualan sebesar Rp57.000 per kg, yang dikaitkan dengan kemarau, El Niño, dan persoalan rantai pasok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 1 September 2026 juga mencatat harga

cabai rawit merah di pasar modern Maluku Utara sebesar Rp179,9 ribu per kg, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional sekitar Rp99,9 ribu per kg. BMKG menyatakan El Niño 2026 telah mencapai kategori kuat (indeks ENSO +1,59 pada awal Agustus) dengan curah hujan Agustus–September diperkirakan rendah hingga sangat rendah, kondisi yang berpotensi menekan produksi hortikultura. Karena cabai umumnya dipasok dari luar Kabupaten Halmahera Tengah, kenaikan harga di sentra produksi diteruskan ke harga konsumen dan diperberat biaya distribusi antarpulau.

2. Harga BBM dan biaya transportasi yang bertahan tinggi, dengan tekanan solar meningkat pada September

Kelompok transportasi tetap menjadi sumber tekanan struktural dengan inflasi y-on-y 14,72 persen (Juli), 14,30 persen (Agustus), dan 16,69 persen (September), serta andil terhadap inflasi umum sebesar 1,42; 1,40; dan 1,64 persen. Subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi naik dari 21,51 persen pada Juli menjadi 24,59 persen pada September. Bensin tetap menjadi penyumbang terbesar (andil y-on-y 1,03–1,04 persen setiap bulan), sedangkan andil solar melonjak dari 0,32 persen (Agustus) menjadi 0,55 persen (September); pada September, solar menjadi satu-satunya komoditas dominan penyumbang inflasi m-to-m kelompok ini (0,21 persen). Fluktuasi bulanan juga tinggi, yaitu +1,63 persen pada Juli (bensin dengan andil 0,35 persen), −0,84 persen pada Agustus, dan +1,98 persen pada September.

Penyebabnya diduga terkait faktor eksternal dan distribusi. Harga minyak mentah Brent berada pada kisaran US$80–90 per barel pada Juli–Agustus dan kembali menembus US$100 per barel pada September 2026 akibat eskalasi konflik AS–Iran dan gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang sebelum perang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Di dalam negeri, harga BBM bersubsidi dan Pertamax relatif tetap (Pertalite Rp10.000, Biosolar Rp6.800, dan Pertamax Rp15.950 per liter) setelah penyesuaian harga Pertamax sejak 10 Juni 2026, namun pada 1 September 2026 sejumlah BBM nonsubsidi naik, antara lain Dexlite, Pertamina Dex (Rp25.200 per liter, dari Rp21.150), Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Kenaikan harga solar nonsubsidi, pelemahan rupiah (Rp17.855 per dolar AS pada 22 September 2026, melemah 0,78 persen dari akhir Agustus), dan tingginya biaya distribusi BBM ke wilayah kepulauan diduga mendorong naiknya andil solar di Halmahera Tengah serta meningkatkan biaya operasional angkutan laut, angkutan barang, dan nelayan.

3. Fluktuasi harga hasil laut yang tinggi antarbulan

Komoditas perikanan kembali menjadi penyumbang utama inflasi y-on-y kelompok makanan. Ikan cakalang/ikan sisik memberikan andil yang terus meningkat, yaitu 0,42 persen (Juli), 0,49 persen (Agustus), dan 0,66 persen (September), menjadikannya penyumbang terbesar kedua pada September setelah cabai. Komoditas lain seperti ikan asap (andil 0,18 persen pada Agustus), ikan selar/ikan tude (0,12 persen pada September), ikan kembung, dan ikan tuna juga masuk daftar penyumbang inflasi. Di sisi lain, ikan malalugis/ikan sorihi berbalik dari penyumbang deflasi y-on-y 0,29 persen (Juli) menjadi penyumbang inflasi 0,15 persen (Agustus), kemudian kembali menjadi penyumbang deflasi 0,02 persen (September), sementara ikan asap mencatat deflasi m-to-m terbesar pada September (andil 0,10 persen) padahal masih menjadi penyumbang inflasi y-on-y (0,08 persen).

Pola naik-turun antarbulan ini menunjukkan harga ikan sulit diprediksi dan rentan terhadap gangguan pasokan jangka pendek. Hal ini diduga terkait musim tangkap, kondisi cuaca dan gelombang laut, serta biaya operasional melaut yang meningkat seiring kenaikan harga solar

sebagaimana diuraikan pada butir b.

4. Harga emas perhiasan: andil masih tinggi namun mulai menurun

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatat inflasi y-on-y yang tinggi namun menurun, yaitu 3,98 persen (Juli), 3,68 persen (Agustus), dan 3,01 persen (September). Kenaikan ini didorong hampir seluruhnya oleh emas perhiasan (andil y-on-y 0,22; 0,21; dan 0,19 persen), yang tercermin pada subkelompok perawatan pribadi lainnya dengan inflasi 17,09 persen (Juli), 16,46 persen (Agustus), dan 14,19 persen (September). Emas perhiasan mulai menjadi penyumbang deflasi m-to-m (andil 0,01 persen pada Juli dan Agustus, serta 0,03 persen pada September) seiring koreksi harga emas global akibat penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS; harga emas dunia dilaporkan turun hingga 6 persen dalam tiga hari perdagangan awal September 2026 dan berada di sekitar US$4.265–US$4.283 per troy ons pada paruh kedua September, dengan harga emas Antam sekitar Rp2,59 juta per gram pada 25 September 2026.

Harga emas bersumber dari pasar global sehingga berada di luar jangkauan kebijakan pengendalian inflasi daerah secara langsung. Namun, perkembangannya tetap perlu dipantau karena kenaikan suku bunga The Fed (dilaporkan menjadi 3,75–4,00 persen pada September 2026) dan ketidakpastian geopolitik membuat harga emas berpotensi tetap bergejolak.

5. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dan risiko El Niño

Perubahan harga yang berlawanan arah pada beberapa komoditas pangan menunjukkan rentannya rantai pasok antarpulau. Bawang merah, yang pada Juli masih menjadi penyumbang inflasi y-on-y (0,12 persen), berbalik menjadi penyumbang deflasi y-on-y terbesar pada Agustus (0,38 persen) dan September (0,22 persen), bersama tomat, pisang, dan kangkung; deflasi m-to-m tomat pada Agustus bahkan mencapai 0,47 persen. Sebaliknya, beras yang pada Juli menyumbang inflasi y-on-y 0,07 persen kembali mencatat andil inflasi m-to-m 0,09 persen pada September, dan daging ayam ras, tempe, serta tahu mentah mulai masuk daftar penyumbang inflasi m-to-m. Minyak goreng tetap menjadi penyumbang inflasi y-on-y yang signifikan (0,29; 0,25; dan 0,20 persen), meskipun mulai memberikan andil deflasi m-to-m (0,04 persen pada Agustus dan 0,05 persen pada September).

Ke depan, risiko pasokan meningkat. BMKG memperkirakan El Niño bertahan hingga awal 2027 dengan peluang kategori moderat 98 persen dan kategori kuat 62 persen, sementara IMF dalam World Economic Outlook Juli 2026 menaikkan proyeksi inflasi global 2026 menjadi 4,7 persen (dari 4,1 persen pada 2025) dan menilai disinflasi global masih tertahan. Pemerintah pusat menyatakan stok beras nasional aman (cadangan beras pemerintah sekitar 5,2 juta ton per Juli 2026), namun Halmahera Tengah tetap rentan terhadap gangguan distribusi laut, keterlambatan pengiriman, dan kenaikan biaya logistik.

Ringkasan komoditas dan kelompok pengeluaran dominan per bulan disajikan pada tabel berikut.

Bulan	Kelompok pengeluaran dominan	Inflasi y-on-y kelompok	Komoditas utama pendorong
Juli 2026	Transportasi	14,72% (andil 1,42%)	Bensin (andil 1,03%), solar (andil 0,33%)

Bulan	Kelompok pengeluaran dominan	Inflasi y-on-y kelompok	Komoditas utama pendorong
	Perawatan pribadi & jasa lainnya	3,98% (andil 0,28%)	Emas perhiasan (andil 0,22%)
	Makanan, minuman & tembakau	0,85% (andil 0,36%)	Ikan cakalang (andil 0,42%), minyak goreng (andil 0,29%)
Agustus 2026	Transportasi	14,30% (andil 1,40%)	Bensin (andil 1,03%), solar (andil 0,32%)
	Perawatan pribadi & jasa lainnya	3,68% (andil 0,27%)	Emas perhiasan (andil 0,21%)
	Makanan, minuman & tembakau	3,32% (andil 1,37%)	Ikan cakalang (andil 0,49%), minyak goreng (andil 0,25%), ikan asap (andil 0,18%)
September 2026	Transportasi	16,69% (andil 1,64%)	Bensin (andil 1,04%), solar (andil 0,55%)
	Makanan, minuman & tembakau	8,46% (andil 3,48%)	Cabai merah (andil 1,40%), cabai rawit (andil 1,07%), ikan cakalang (andil 0,66%)
	Perawatan pribadi & jasa lainnya	3,01% (andil 0,22%)	Emas perhiasan (andil 0,19%)

Secara umum, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Halmahera Tengah pada Triwulan III 2026 terpusat pada tiga faktor utama, yaitu: (1) lonjakan harga cabai merah dan cabai rawit pada September 2026 yang menyumbang hampir separuh inflasi y-on-y akibat kemarau/El Niño dan ketergantungan pasokan dari luar daerah; (2) tingginya harga BBM dan biaya transportasi, dengan tekanan solar yang meningkat di tengah harga minyak dunia di atas US$100 per barel dan pelemahan rupiah; serta (3) volatilitas harga hasil laut dan komoditas pangan strategis lainnya akibat faktor cuaca, musim tangkap, dan rantai distribusi antarpulau.

Inflasi y-on-y yang telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional (3,5 persen), potensi berlanjutnya El Niño hingga awal 2027, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang akhir tahun menuntut TPID memfokuskan pengendalian pada stabilisasi pasokan dan harga cabai, pengamanan distribusi BBM dan logistik antarpulau, serta penguatan pemantauan harga hasil laut pada Triwulan IV 2026. Efek basis rendah akan berkurang pada triwulan mendatang karena IHK Halmahera Tengah tahun 2025 meningkat dari 107,51 (September) menjadi 109,13 (Desember), sehingga inflasi y-on-y berpotensi melandai apabila harga bergerak stabil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beserta Perangkat Daerah (OPD) anggota telah melaksanakan serangkaian kebijakan dan kegiatan sepanjang bulan Juli sampai dengan September 2026. Kebijakan yang dilaksanakan disusun untuk merespons lima permasalahan pokok yang teridentifikasi, yaitu: (a) lonjakan harga cabai merah dan cabai rawit pada September 2026; (b) harga BBM dan biaya transportasi yang bertahan tinggi; (c) fluktuasi harga hasil laut antarbulan; (d) harga emas perhiasan; serta (e) ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dan risiko El Niño. Uraian kebijakan per permasalahan disajikan sebagai berikut.

3.1. Kebijakan Penanganan Lonjakan Harga Cabai Merah dan Cabai Rawit

Merespons lonjakan harga cabai pada September 2026, ketika cabai merah dan cabai rawit memberikan andil inflasi y-on-y masing-masing 1,40 persen dan 1,07 persen serta andil inflasi m-to-m masing-masing 1,07 persen dan 0,99 persen, TPID melaksanakan pemantauan harga langsung di pasar, sedangkan Dinas Pertanian melaksanakan intervensi hulu berupa penyaluran benih dan sarana pendukung budidaya tomat dan cabai kepada kelompok tani.

No	Nama Kegiatan / OPD	Waktu	Tempat	Keterangan
1	**TPID Halmahera Tengah – Inspeksi Mendadak (Sidak) Pasar**	23 September 2026	Pasar Rakyat Weda	Dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500.6.17.2/542/2026 tanggal 22 September 2026, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Rilis BPS Agustus 2026 (inflasi y-on-y 3,08 persen), dan pemantauan harga harian yang menunjukkan harga cabai selalu naik. Dipimpin Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, diikuti Kejaksaan Negeri Weda, Kodim 1512/Weda, BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Satpol PP, dan anggota TPID (30 peserta menurut daftar hadir), dengan objek pemantauan distributor barito dan pedagang sembako.

No	Nama Kegiatan / OPD	Waktu	Tempat	Keterangan
2	**Dinas Pertanian – Distribusi Benih Kemasan Hortikultura (Tomat, Cabai Rawit, dan Cabai Keriting)**	3–5 September 2026	Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Utara, dan Patani	Penyaluran 165 sachet benih (masing-masing 55 sachet benih tomat, cabai rawit, dan cabai keriting) kepada 11 kelompok sasaran, yaitu 10 Kelompok Tani (Poktan) Hortikultura di Kecamatan Weda, Weda Selatan, dan Weda Utara serta 1 Poktan/Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Patani dan sekitarnya. Benih berupa sachet pabrikan bersertifikat dengan daya tumbuh di atas 85 persen. Capaian 100 persen dari target dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan bersama Korwil Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai program intervensi hulu penanganan inflasi daerah.
3	**Dinas Pertanian – Penyaluran Alat Penunjang, Obat, dan Pupuk (APOP)**	3–5 September 2026	Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Utara, dan Patani	Penyaluran 174 unit sarana pendukung budidaya kepada 11 kelompok yang sama, terdiri atas mulsa plastik (20), Agrimec (30), Score (30), Alika (30), Gandasil B (32), dan Gandasil D (32), sebagai paket pendukung benih agar hasil produksi lebih optimal. Capaian 100 persen dan dibuktikan dengan BAST.

Hasil pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada Sidak Pasar tanggal 23 September 2026 disajikan pada tabel berikut.

No	Komoditas	Kondisi	Harga	Keterangan
1	**Beras premium**	Naik Rp10.000/sak	Rp19.000/kg	Kenaikan berasal dari harga di agen
2	**Beras medium**	Stabil	Rp17.000/kg	Berasal dari harga di agen
3	**Minyakita**	Di atas HET	Rp23.000/lt	Belum ada stok yang dari Bulog
4	**Minyak Bimoli**	Mengalami penurunan	Rp30.000/lt menjadi Rp25.000/lt	Stok aman
5	**Bawang merah**	Stabil	Rp50.000/kg	Harga stabil dan stok cukup
6	**Bawang putih**	Stabil	Rp50.000/kg	Harga stabil dan stok cukup
7	**Cabai merah keriting**	Mengalami kenaikan signifikan	Rp60.000–Rp70.000/kg menjadi Rp140.000–Rp150.000/kg	Pengaruh El Niño yang berkepanjangan

No	Komoditas	Kondisi	Harga	Keterangan
8	**Cabai rawit merah**	Mengalami kenaikan signifikan	Rp60.000–Rp70.000/kg menjadi Rp160.000–Rp170.000/kg	Pengaruh El Niño yang berkepanjangan
9	**Tomat**	Mengalami kenaikan	Rp15.000/kg menjadi Rp18.000/kg	Harga baru mulai naik, stok cukup

Berdasarkan analisis hasil sidak, secara umum harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Halmahera Tengah masih terkendali dan ketersediaan stok mencukupi. Perhatian utama tertuju pada cabai merah keriting dan cabai rawit merah yang harganya naik sekitar dua kali lipat atau lebih dibandingkan harga sebelumnya akibat dampak El Niño yang berkepanjangan. Sebagian besar kebutuhan kedua komoditas tersebut berasal dari luar Halmahera Tengah, antara lain Manado, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Ambon, dan Sorong. Temuan ini sejalan dengan data BPS yang mencatat cabai merah dan cabai rawit sebagai penyumbang terbesar inflasi September 2026.

Sebagai tindak lanjut, hasil sidak merekomendasikan langkah intervensi Pemerintah Daerah berikut: (1) melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok secara berkala melalui TPID; (2) memperkuat koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok dengan distributor, agen, dan pelaku usaha; (3) melaksanakan operasi pasar terhadap komoditas yang harganya bergejolak atau naik signifikan; (4) memberikan subsidi transportasi; (5) melakukan koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda dan instansi vertikal dalam pengendalian inflasi; serta (6) menggalakkan gerakan menanam cabai. Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut yang direncanakan dan belum merupakan kegiatan yang telah terealisasi pada Triwulan III 2026.

Rincian distribusi benih kemasan dan APOP Dinas Pertanian per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

No	Kecamatan Tujuan	Benih (sachet)	APOP (unit)	Kelompok	Keterangan
1	Weda	36	47	3	Poktan Hortikultura
2	Weda Selatan	60	68	4	Poktan Hortikultura
3	Weda Utara	54	51	3	Poktan Hortikultura
4	Patani dan sekitarnya	15	8	1	Poktan/KWT
	Total	165	174	11	

Dinas Pertanian mengestimasi bahwa ketika komoditas tersebut memasuki masa panen yang diproyeksikan 3–4 bulan setelah penyaluran, ketergantungan pasar Weda terhadap pasokan cabai dan tomat dari luar daerah akan menurun sehingga harga eceran di pasar lokal lebih stabil. Mengingat dampaknya baru dapat dirasakan setelah masa panen, intervensi hulu ini perlu dilengkapi langkah jangka pendek sebagaimana direkomendasikan hasil sidak, terutama operasi pasar dan penguatan distribusi. Adapun hambatan yang diidentifikasi Dinas Pertanian

adalah (1) sebagian KWT di Weda Tengah belum memiliki sarana persemaian sederhana sehingga risiko benih gagal tumbuh akibat hama dan curah hujan ekstrem cukup tinggi, serta (2) keterbatasan air pada musim kemarau di wilayah yang jauh dari sumber air sehingga diperlukan edukasi penyiraman hemat air. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan intensif oleh PPL di setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan serta penyaluran paket stimulan pendukung (pupuk organik cair dan mulsa plastik) bersamaan dengan benih pada pengadaan berikutnya.

3.2. Kebijakan Penanganan Harga BBM dan Biaya Transportasi

Kelompok transportasi mencatat inflasi y-on-y 14,72 persen (Juli), 14,30 persen (Agustus), dan 16,69 persen (September) dengan andil solar yang meningkat dari 0,32 persen (Agustus) menjadi 0,55 persen (September). Pada Triwulan III 2026 belum tercatat kegiatan khusus Perangkat Daerah untuk permasalahan ini dalam dokumen pelaksanaan yang dihimpun untuk laporan ini. Pengendalian harga BBM pada periode tersebut bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat yang mempertahankan harga BBM bersubsidi (Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter tidak mengalami perubahan pada September 2026), sedangkan penyesuaian harga pada awal September 2026 terjadi pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Di tingkat daerah, hasil Sidak Pasar 23 September 2026 merekomendasikan pemberian subsidi transportasi dan penguatan koordinasi distribusi dengan distributor, agen, dan pelaku usaha untuk menahan kenaikan biaya logistik barang kebutuhan pokok. Penertiban kepatuhan harga BBM nonsubsidi di tingkat pengecer sebagaimana dilaksanakan pada Triwulan II 2026 perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan pada triwulan berikutnya mengingat harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah masih menekan harga solar nonsubsidi.

3.3. Kebijakan Penanganan Fluktuasi Harga Hasil Laut

Ikan cakalang/ikan sisik memberikan andil inflasi y-on-y yang terus meningkat dari 0,42 persen (Juli) menjadi 0,49 persen (Agustus) dan 0,66 persen (September), sementara harga komoditas perikanan lain bergerak naik-turun antarbulan. Pada Triwulan III 2026 belum tercatat kegiatan khusus Perangkat Daerah untuk permasalahan ini dalam dokumen pelaksanaan yang dihimpun untuk laporan ini. Pemantauan harga tetap dilakukan melalui pemantauan harga harian TPID dan sidak pasar, namun daftar komoditas pantauan pada Sidak Pasar 23 September 2026 belum mencakup ikan. Oleh karena itu, komoditas ikan segar perlu dimasukkan dalam daftar pantauan sidak dan pemantauan berkala TPID pada triwulan berikutnya, termasuk koordinasi dengan Dinas Perikanan terkait kondisi musim tangkap dan biaya operasional nelayan.

3.4. Kebijakan Terkait Harga Emas Perhiasan

Sebagaimana teridentifikasi pada Poin 2, harga emas perhiasan bersumber dari pasar global dan berada di luar jangkauan kendali kebijakan pengendalian inflasi daerah secara langsung. Andil emas perhiasan terhadap inflasi y-on-y menurun dari 0,22 persen (Juli) menjadi 0,19 persen (September) seiring koreksi harga emas dunia. Oleh karena itu, pada Triwulan III 2026 TPID tidak melaksanakan kebijakan intervensi harga khusus untuk komoditas ini, namun tetap memantau perkembangannya melalui forum koordinasi TPID sebagai bagian dari evaluasi inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya secara keseluruhan.

3.5. Kebijakan Penguatan Ketahanan Pasokan Bahan Pokok dan Stabilisasi Harga Pangan

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok strategis (beras, minyak goreng, dan gula pasir) yang sebagian besar bergantung pada pasokan dari luar daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Program Penanggulangan Inflasi dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. GPM merupakan salah satu dari 13 aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2026 dalam upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan dilaksanakan bekerja sama dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Bank Indonesia, dan Perum Bulog.

No	Nama Kegiatan / OPD	Waktu	Tempat	Keterangan
1	**Dinas Ketahanan Pangan – Gerakan Pangan Murah (GPM) Kecamatan Weda**	4 Agustus 2026	Ruang Terbuka Taman Kota Weda, Kecamatan Weda	Penjualan beras kemasan 5 kg sebanyak 2,5 ton, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 1.300 liter, dan gula pasir kemasan 1 kilogram sebanyak 1.300 kg.
2	**Dinas Ketahanan Pangan – GPM Kecamatan Weda Selatan**	6 Agustus 2026	Kantor Camat Weda Selatan (masyarakat dari 7 desa)	Penjualan beras 2,5 ton, minyak goreng 1.000 liter, dan gula pasir 1.000 kg.
3	**Dinas Ketahanan Pangan – GPM Kecamatan Patani**	8 Agustus 2026	Kantor Camat dan Kantor Desa Kecamatan Patani	Penjualan beras 1,5 ton, minyak goreng 700 liter, dan gula pasir 700 kg.
4	**Dinas Ketahanan Pangan – GPM Kecamatan Patani Barat**	8 Agustus 2026	Kantor Camat dan Kantor Desa Kecamatan Patani Barat	Penjualan beras 2 ton, minyak goreng 1.000 liter, dan gula pasir 1.000 kg.
5	**Dinas Ketahanan Pangan – GPM Kecamatan Weda Tengah**	11–12 Agustus 2026	Kantor Camat dan Kantor Desa Kecamatan Weda Tengah	Penjualan beras 1,5 ton, minyak goreng 1.000 liter, dan gula pasir 1.000 kg.

Seluruh pelaksanaan GPM menjual beras kemasan 5 kg dengan harga Rp50.000 per sak (setara Rp10.000 per kilogram), minyak goreng Rp15.000 per liter, dan gula pasir Rp15.000 per kilogram. Secara keseluruhan, volume yang disediakan pada lima lokasi pelaksanaan mencapai 10 ton beras, 5.000 liter minyak goreng, dan 5.000 kilogram gula pasir. Sebagai gambaran, harga beras medium dan Minyakita yang ditemukan pada Sidak Pasar 23 September 2026 (Rp17.000 per kilogram dan Rp23.000 per liter) lebih tinggi dibandingkan harga GPM. Pelaksanaan GPM dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp615.000.000 sebagaimana diajukan dalam Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 500.1.3.2/085/DKP-HT/VIII/2026 tanggal 23 Juli 2026, dengan dasar antara lain Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 49 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Gerakan Pangan Murah.

Berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan, pelaksanaan GPM berjalan baik dengan animo masyarakat yang tinggi. Pada periode yang sama, minyak goreng tercatat memberikan andil deflasi m-to-m sebesar 0,04 persen (Agustus) dan 0,05 persen (September) pada data BPS, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai dampak langsung GPM karena dipengaruhi pula oleh faktor lain. Di sisi lain, beras kembali memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen pada September 2026 dan Minyakita masih ditemukan di atas HET dengan stok dari Bulog yang belum tersedia di pasar saat sidak. Sebagai bahan evaluasi, laporan GPM saat ini memuat volume komoditas yang disediakan, sehingga data realisasi penjualan per lokasi perlu dilengkapi untuk mengukur efektivitas intervensi. Selain itu, hasil sidak merekomendasikan operasi pasar untuk komoditas yang harganya bergejolak dan koordinasi distribusi dengan distributor dan agen guna menjamin ketersediaan stok Minyakita sesuai HET, serta mengantisipasi risiko El Niño terhadap pasokan pangan pada triwulan berikutnya.

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2026 terpusat pada tiga langkah, yaitu: (1) intervensi pasokan dan daya beli bahan pokok melalui lima kali pelaksanaan GPM pada 4–12 Agustus 2026; (2) pemantauan harga langsung melalui Sidak Pasar pada 23 September 2026 yang mengidentifikasi cabai sebagai komoditas paling bergejolak; serta (3) intervensi hulu hortikultura melalui penyaluran 165 sachet benih dan 174 unit APOP kepada 11 kelompok pada 3–5 September 2026. Mengingat dampak intervensi hulu baru dirasakan setelah masa panen, langkah jangka pendek berupa operasi pasar, penguatan distribusi, dan subsidi transportasi, serta perluasan kebijakan pada BBM dan hasil laut, perlu menjadi fokus TPID pada Triwulan IV 2026.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Bagian ini menyajikan evaluasi atas dampak dan keefektifan kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2026 sebagaimana telah diuraikan pada Poin 3, yaitu: (1) pengolahan dan optimalisasi lahan sawah (2 Juni 2026); (2) penyaluran benih padi (10 Juni 2026); (3) High Level Meeting (HLM) TPID (17 Juni 2026); (4) penertiban dan pengawasan HET BBM di pengecer (28 Juni 2026); (5) penyaluran bahan pangan pokok melalui lembaga jaringan distribusi pangan (30 Juni 2026); dan (6) Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 4–12 Agustus 2026. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kabupaten Halmahera Tengah pada bulan pelaksanaan kebijakan dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan September 2026, untuk melihat apakah kebijakan tersebut berdampak nyata terhadap pergerakan harga komoditas yang menjadi

sasarannya.

Kebijakan bulan Juni 2026 dievaluasi pada triwulan ini karena evaluasi Triwulan II dibatasi pada kebijakan April–Mei 2026 agar tersedia data bulan-bulan sesudahnya. Pada bulan Juli 2026 tidak tercatat kegiatan pelaksanaan kebijakan dalam dokumen yang dihimpun. Kebijakan bulan September 2026 (distribusi benih hortikultura dan APOP pada 3–5 September serta sidak pasar 23 September) belum dievaluasi karena data BPS bulan-bulan sesudahnya belum tersedia, dan akan dievaluasi pada Laporan Triwulan IV 2026. Seluruh data yang digunakan adalah data Kabupaten Halmahera Tengah. Pada tabel, "Tidak dominan" berarti komoditas tidak termasuk komoditas dominan pemberi andil pada BRS bulan yang bersangkutan, sedangkan "n/a" berarti data bulan tersebut tidak tersedia pada dokumen yang digunakan.

4.1. Evaluasi Kebijakan Bulan Juni 2026

4.1.1. Pengolahan dan Optimalisasi Lahan Sawah (Dinas Pertanian, 2 Juni 2026)

Kebijakan ini berupa pengolahan lahan sawah di Wairoro, Kecamatan Weda Selatan, seluas 50 hektare dari target 150 hektare dengan melibatkan 32 anggota kelompok tani, sebagai bagian dari program optimalisasi lahan untuk mendukung produksi beras lokal.

Indikator	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Andil inflasi y-on-y beras	n/a	+0,07%	Tidak dominan	-0,02%
Andil inflasi m-to-m beras	n/a	Tidak dominan	Tidak dominan	+0,09%
Status (y-on-y)	n/a	Inflasi	Tidak dominan	Deflasi

Evaluasi dampak: Belum dapat dinilai berdampak pada harga. Pada saat pelaksanaan, realisasi pengolahan lahan baru mencapai 33,3 persen dari target (50 dari 150 hektare) dan pengolahan lahan merupakan tahap awal budidaya. Mengingat masa tanam hingga panen padi umumnya berkisar 3–4 bulan, produksi dari kegiatan ini paling cepat baru memasuki pasar pada akhir September hingga Oktober 2026, sehingga secara teknis belum dapat memengaruhi harga beras pada data BPS sampai dengan September 2026. Data BPS konsisten dengan hal tersebut: beras memberikan andil inflasi y-on-y 0,07 persen pada Juli, tidak lagi dominan pada Agustus, dan pada September memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen yang menandakan harga beras naik pada bulan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil Sidak Pasar 23 September 2026 yang mencatat harga beras premium naik Rp10.000 per sak di tingkat agen (harga Rp19.000 per kilogram), sedangkan beras medium stabil di Rp17.000 per kilogram. Andil deflasi y-on-y beras sebesar 0,02 persen pada September tidak dapat dikaitkan dengan kebijakan ini karena lahan belum menghasilkan panen, dan lebih mencerminkan perbandingan terhadap harga September 2025. Dokumen pelaksanaan juga belum memuat capaian lanjutan (sisa lahan 100 hektare, luas tanam, dan jadwal panen) sehingga kontribusi kebijakan terhadap pasokan beras belum dapat diukur.

4.1.2. Penyaluran Benih Padi (Dinas Pertanian, 10 Juni 2026)

Kebijakan berupa penyaluran 2 ton benih padi unggul kepada kelompok tani di Wairoro,

Kecamatan Weda Selatan, untuk mendukung optimalisasi lahan sawah guna mencukupi ketersediaan beras sebagai bahan pokok utama dan menjaga stabilitas harganya.

Indikator	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Andil inflasi y-on-y beras	n/a	+0,07%	Tidak dominan	-0,02%
Andil inflasi m-to-m beras	n/a	Tidak dominan	Tidak dominan	+0,09%

Evaluasi dampak: Sebagaimana pengolahan lahan sawah, penyaluran benih merupakan intervensi hulu yang dampaknya baru terasa setelah panen. Dengan kebutuhan benih padi yang umumnya sekitar 25–40 kilogram per hektare, 2 ton benih secara teknis dapat mencukupi sekitar 50–80 hektare, sehingga selaras dengan luas lahan yang telah diolah (50 hektare) tetapi masih jauh di bawah target 150 hektare. Dengan masa tanam hingga panen 3–4 bulan sejak penyaluran 10 Juni 2026, panen paling cepat terjadi pada September–Oktober 2026 dan belum tercermin pada data BPS yang tersedia. Data BPS menunjukkan beras tidak dominan pada Agustus dan kembali memberikan andil inflasi m-to-m pada September (0,09 persen), sehingga belum ada indikasi dampak penurunan harga. Efektivitas kebijakan ini perlu dinilai ulang pada laporan triwulan berikutnya setelah masa panen, dengan dukungan data luas tanam dan produksi dari Dinas Pertanian.

4.1.3. High Level Meeting TPID (17 Juni 2026)

Kebijakan berupa forum koordinasi lintas sektor di Kantor Bupati Halmahera Tengah yang dihadiri Forkopimda, Bank Indonesia, BPS, Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara, KUPP Weda, instansi vertikal, Perangkat Daerah anggota TPID, Perusda Fagogoru Maju Bersama, pelaku usaha, dan distributor, guna menyinkronkan kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor termasuk penguatan distribusi dan produksi pangan daerah.

Indikator	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Inflasi m-to-m (umum)	+0,96%	-0,66%	-0,83%	+1,85%
Inflasi y-on-y (umum)	3,11%	2,12%	3,08%	5,37%
Andil inflasi m-to-m kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	n/a	-0,80%	-0,73%	+1,68%
Andil inflasi m-to-m cabai rawit	+0,40%	-0,37%	+0,05%	+0,99%
Andil inflasi m-to-m cabai merah	n/a	-0,22%	+0,04%	+1,07%

Evaluasi dampak: HLM merupakan instrumen koordinasi sehingga dampaknya terhadap harga bersifat tidak langsung dan tidak dapat diukur tanpa tindak lanjut operasional yang terdokumentasi. Setelah HLM, inflasi m-to-m turun dari 0,96 persen (Juni) menjadi deflasi 0,66 persen (Juli) dan 0,83 persen (Agustus). Namun, penurunan tersebut terutama bersumber dari

komoditas hortikultura, yaitu cabai rawit (0,37 persen), cabai merah (0,22 persen), dan bawang merah (0,16 persen) pada Juli, serta tomat (0,47 persen) dan bawang merah (0,20 persen) pada Agustus, yang lebih mencerminkan faktor pasokan dan musiman dan tidak dapat dikaitkan dengan HLM. Pada September tekanan berbalik: inflasi m-to-m mencapai 1,85 persen dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 1,68 persen (sekitar 91 persen dari total) akibat cabai merah (1,07 persen) dan cabai rawit (0,99 persen), sedangkan inflasi y-on-y mencapai 5,37 persen, tertinggi selama Januari–September 2026. Perlu dicatat bahwa kenaikan inflasi y-on-y Agustus (dari 2,12 menjadi 3,08 persen) terjadi meskipun m-to-m mengalami deflasi, karena deflasi bulanan Agustus 2025 lebih dalam (1,75 persen) sehingga basis perbandingan lebih rendah. Dalam dokumen pelaksanaan tidak tercatat tindak lanjut operasional hasil HLM pada Juli–Agustus (misalnya operasi pasar atau subsidi ongkos angkut) maupun rencana antisipasi lonjakan harga cabai. Dengan demikian, HLM belum menunjukkan dampak yang terukur terhadap pengendalian inflasi dan perlu diperkuat dengan target serta rencana aksi yang terukur.

4.1.4. Penertiban dan Pengawasan HET BBM di Pengecer (Bagian Ekonomi dan SDA, 28 Juni 2026)

Kebijakan berupa penertiban terhadap pengecer BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dexlite) di Kecamatan Weda, Weda Tengah, dan Weda Selatan yang menjual dengan harga tidak sesuai Surat Edaran Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditandatangani Bupati, untuk menekan penyimpangan harga BBM di lini pengecer sebagai salah satu sumber tekanan biaya distribusi dan transportasi.

Indikator	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Inflasi y-on-y kelompok transportasi	14,33%	14,72%	14,30%	16,69%
Andil inflasi y-on-y bensin	n/a	+1,03%	+1,03%	+1,04%
Andil inflasi y-on-y solar	n/a	+0,33%	+0,32%	+0,55%
Andil inflasi m-to-m bensin	n/a	+0,35%	-0,09%	Tidak dominan
Andil inflasi m-to-m solar	n/a	-0,18%	Tidak dominan	+0,21%

Evaluasi dampak: Kebijakan ini belum menunjukkan dampak yang dapat dikonfirmasi pada data BPS. Penertiban bersifat satu kali (28 Juni 2026) pada tiga kecamatan dan menyasar pengecer BBM nonsubsidi, sementara dalam dokumen pelaksanaan tidak tercatat penertiban lanjutan pada Juli–September 2026. Setelah penertiban, inflasi y-on-y kelompok transportasi justru naik dari 14,33 persen (Juni) menjadi 14,72 persen (Juli), sempat turun menjadi 14,30 persen (Agustus), kemudian naik menjadi 16,69 persen (September). Andil y-on-y bensin bertahan di kisaran 1,03–1,04 persen selama Juli–September yang menunjukkan tingkat harga bensin tetap tinggi dan tidak terkoreksi. Pada Juli, bensin bahkan memberikan andil inflasi m-to-m 0,35 persen; deflasi m-to-m bensin baru terjadi pada Agustus (0,09 persen) dengan besaran kecil, dan tekanan kemudian beralih ke solar pada September (andil m-to-m 0,21 persen; andil y-on-y naik dari 0,32 menjadi 0,55 persen). Kenaikan solar pada September

bertepatan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada awal September 2026 (antara lain Dexlite dan Pertamina Dex), sedangkan harga BBM bersubsidi (Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter) tidak berubah. Tekanan tersebut berada di luar jangkauan penertiban pengecer yang hanya menyasar penyimpangan terhadap HET. Selain itu, data BPS yang digunakan menyajikan bensin dan solar secara agregat sehingga dampak penertiban pada Pertamax dan Dexlite tidak dapat dipisahkan secara tepat.

4.1.5. Penyaluran Bahan Pangan Pokok melalui Lembaga Jaringan Distribusi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan, 30 Juni 2026)

Kebijakan berupa penyaluran bahan pangan pokok (beras, gula, minyak goreng, dan telur) melalui lembaga jaringan distribusi pangan di Kecamatan Weda Tengah, Weda Timur, Patani, dan Patani Timur guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

Indikator	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Andil inflasi y-on-y minyak goreng	+0,30%	+0,29%	+0,25%	+0,20%
Andil inflasi y-on-y gula pasir	n/a	-0,02%	-0,01%	Tidak dominan
Andil inflasi y-on-y telur ayam ras	Tidak dominan	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Andil inflasi y-on-y beras	n/a	+0,07%	Tidak dominan	-0,02%

Evaluasi dampak: Menunjukkan arah yang positif, namun dampak kebijakan ini belum dapat diatribusikan secara pasti. Setelah penyaluran 30 Juni 2026, andil inflasi y-on-y minyak goreng menurun setiap bulan, dari 0,30 persen (Juni) menjadi 0,29 persen (Juli), 0,25 persen (Agustus), dan 0,20 persen (September), atau turun 0,10 poin persentase dalam tiga bulan. Gula pasir dan telur ayam ras juga tercatat memberikan andil deflasi y-on-y, dan beras berubah dari andil inflasi 0,07 persen (Juli) menjadi andil deflasi 0,02 persen (September). Akan tetapi, kegiatan ini bersifat satu kali pada empat kecamatan, dokumen pelaksanaan belum memuat volume dan realisasi penyaluran, dan pada Agustus berlangsung pula GPM pada komoditas yang sama sehingga pengaruh keduanya tidak dapat dipisahkan. Pasokan yang belum merata juga terlihat pada Sidak Pasar 23 September 2026: Minyakita masih dijual Rp23.000 per liter (di atas HET) karena stok dari Bulog belum tersedia, dan beras kembali memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen pada September. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan perbaikan harga komoditas sasaran, tetapi cakupannya terbatas dan belum cukup untuk memastikan ketersediaan serta kepatuhan harga di seluruh wilayah.

4.2. Evaluasi Kebijakan Bulan Juli 2026

Berdasarkan dokumen pelaksanaan kebijakan yang dihimpun, pada bulan Juli 2026 tidak tercatat kegiatan pengendalian inflasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Kegiatan yang tercatat pada bulan ini hanya persiapan administratif GPM berupa Telaahan Staf Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 500.1.3.2/085/DKP-HT/VIII/2026 tanggal 23 Juli 2026 yang mengajukan kebutuhan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp615.000.000, yang belum merupakan intervensi langsung terhadap harga.

Indikator	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Inflasi y-on-y kelompok transportasi	14,72%	14,30%	16,69%
Andil inflasi m-to-m bensin	+0,35%	-0,09%	Tidak dominan
Andil inflasi y-on-y ikan cakalang/ikan sisik	+0,42%	+0,49%	+0,66%

Evaluasi dampak: Deflasi m-to-m Juli sebesar 0,66 persen bukan hasil intervensi kebijakan, melainkan terutama berasal dari penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Pada bulan yang sama, bensin memberikan andil inflasi m-to-m 0,35 persen, terbesar di antara komoditas pemberi andil inflasi bulanan, tanpa respons kebijakan yang tercatat. Tanpa intervensi, tekanan pada dua permasalahan pokok berlanjut: inflasi y-on-y transportasi bertahan pada kisaran 14–17 persen dan andil ikan cakalang/ikan sisik naik setiap bulan dari 0,42 persen (Juli) menjadi 0,49 persen (Agustus) dan 0,66 persen (September). Kekosongan kebijakan pada Juli ini menunjukkan bahwa penanganan komoditas hasil laut dan BBM belum berkelanjutan dibandingkan Triwulan II, ketika masih terdapat pembagian ikan segar (26 Mei 2026) dan penertiban HET BBM (28 Juni 2026).

4.3. Evaluasi Kebijakan Bulan Agustus 2026

4.3.1. Gerakan Pangan Murah (Dinas Ketahanan Pangan, 4–12 Agustus 2026)

Kebijakan berupa Gerakan Pangan Murah dalam rangka Program Penanggulangan Inflasi dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, bekerja sama dengan OPD, Bank Indonesia, dan Perum Bulog, di lima lokasi: Kecamatan Weda (4 Agustus), Weda Selatan (6 Agustus), Patani dan Patani Barat (8 Agustus), serta Weda Tengah (11–12 Agustus). Harga jual ditetapkan Rp10.000 per kilogram untuk beras (kemasan 5 kg Rp50.000), Rp15.000 per liter untuk minyak goreng, dan Rp15.000 per kilogram untuk gula pasir, dengan total volume 10 ton beras, 5.000 liter minyak goreng, dan 5.000 kilogram gula pasir yang dibiayai dari BTT sebesar Rp615.000.000.

Indikator	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
Andil inflasi m-to-m minyak goreng	-0,01%	-0,04%	-0,05%
Andil inflasi m-to-m beras	Tidak dominan	Tidak dominan	+0,09%
Andil inflasi m-to-m kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,80%	-0,73%	+1,68%
Inflasi m-to-m (umum)	-0,66%	-0,83%	+1,85%
Inflasi y-on-y (umum)	2,12%	3,08%	5,37%

Evaluasi dampak: GPM menunjukkan arah yang sejalan dengan tujuan pada komoditas sasaran, tetapi kontribusinya terhadap inflasi umum masih kecil. Sebagai gambaran, harga GPM lebih rendah dari harga pasar pada Sidak Pasar 23 September 2026: beras Rp10.000 dibandingkan beras medium Rp17.000 per kilogram (sekitar 41 persen lebih rendah) dan minyak goreng Rp15.000 dibandingkan Minyakita Rp23.000 per liter (sekitar 35 persen lebih rendah). Pada data BPS, andil deflasi m-to-m minyak goreng membesar dari 0,01 persen (Juli) menjadi 0,04 persen (Agustus) dan 0,05 persen (September), sedangkan andil inflasi y-on-y minyak goreng turun dari 0,29 persen menjadi 0,25 persen dan 0,20 persen; gula pasir masih memberikan andil deflasi y-on-y pada Agustus (0,01 persen) dan tidak lagi dominan pada

September. Namun besarnya kecil: andil deflasi minyak goreng 0,04 persen hanya sekitar 5,5 persen dari andil deflasi m-to-m kelompok makanan pada Agustus (0,73 persen), yang sebagian besar berasal dari tomat (0,47 persen), bawang merah (0,20 persen), dan pisang (0,09 persen), yaitu komoditas yang tidak dijual dalam GPM.
Inflasi y-on-y umum naik dari 2,12 persen (Juli) menjadi 3,08 persen (Agustus) meskipun terjadi deflasi m-to-m 0,83 persen, karena deflasi Agustus 2025 lebih dalam (1,75 persen). Pada September, inflasi m-to-m 1,85 persen dan y-on-y 5,37 persen didorong terutama oleh cabai dan solar yang bukan sasaran GPM, sementara beras kembali memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen dan Minyakita masih dijual di atas HET. Efektivitas GPM juga belum dapat diukur secara penuh karena laporan baru memuat volume yang disediakan, bukan realisasi penjualan per lokasi dan jumlah penerima manfaat, serta penurunan andil minyak goreng turut dipengaruhi faktor lain sehingga belum dapat disimpulkan sebagai dampak langsung GPM. Dengan demikian, GPM berkontribusi positif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok pada komoditas sasaran, tetapi belum cukup untuk menahan inflasi umum yang dipicu komoditas di luar cakupan GPM.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan pada Triwulan III 2026, disusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan kebijakan pengendalian inflasi untuk ditindaklanjuti oleh TPID dan OPD terkait pada Triwulan IV 2026. Rekomendasi disusun berdasarkan dua kategori: (1) perbaikan atas kebijakan yang telah dilaksanakan namun belum optimal; dan (2) usulan kebijakan baru untuk permasalahan yang pada Triwulan III 2026 belum memiliki kebijakan penanganan yang memadai. Rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan inflasi y-on-y September 2026 sebesar 5,37 persen (m-to-m 1,85 persen) yang didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau (andil 3,48 persen) serta kelompok transportasi (andil 1,64 persen), dengan cabai merah (1,40 persen), cabai rawit (1,07 persen), bensin (1,04 persen), dan solar (0,55 persen) sebagai komoditas pemberi andil terbesar.

5.1. Rekomendasi Perbaikan atas Kebijakan Produksi Pangan Lokal

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan optimalisasi lahan sawah dan penyaluran benih padi (Juni 2026) serta intervensi hulu hortikultura berupa penyaluran benih dan APOP (3–5 September 2026) masih berada pada tahap budidaya sehingga belum berdampak terhadap harga pada data BPS sampai dengan September 2026. Berikut rekomendasi percepatan agar dampaknya dapat terealisasi pada Triwulan IV 2026 dan awal 2027:

- Memantau secara berkala hasil tanam dan jadwal panen hortikultura dari penyaluran 165 sachet benih dan 174 unit APOP kepada 11 kelompok (panen diproyeksikan 3–4 bulan setelah penyaluran, yaitu sekitar Desember 2026–Januari 2027), serta menyiapkan skema penyerapan dan distribusi hasil panen ke pasar Weda agar langsung dapat mengurangi ketergantungan pasokan cabai dan tomat dari luar daerah.
- Menindaklanjuti hambatan yang diidentifikasi Dinas Pertanian dengan pendampingan intensif PPL di setiap BPP kecamatan, penyediaan sarana persemaian sederhana bagi KWT di Weda Tengah, edukasi penyiraman hemat air pada musim kemarau, serta penyaluran paket stimulan (pupuk organik cair dan mulsa plastik) bersamaan dengan benih pada pengadaan berikutnya.
- Menyampaikan laporan realisasi panen budidaya cabai 8 hektare di SP 2 Trans Wale

(target 75 ton per musim tanam; target panen sekitar Juli 2026) yang belum tercatat pada dokumen Triwulan III, termasuk penyebab apabila realisasi di bawah target, mengingat harga cabai tetap melonjak pada September 2026.

- Melaporkan tindak lanjut identifikasi lahan sayuran ±20 hektare di Kecamatan Patani ke tahap tanam, karena penyaluran benih pada Triwulan III baru menjangkau 15 sachet benih untuk 1 kelompok di Patani dan sekitarnya.
- Melengkapi data capaian program padi (sisa lahan 100 hektare dari target 150 hektare, luas tanam, jadwal dan hasil panen) serta merencanakan penyerapan hasil panen padi lokal, mengingat beras kembali memberikan andil inflasi m-to-m 0,09 persen pada September 2026 dan harga beras premium naik Rp10.000 per sak di tingkat agen.
- Memperluas jumlah penerima dan jenis komoditas (termasuk tanaman tahan kondisi kering) pada program hulu berikutnya dengan memprioritaskan kecamatan yang pasokan cabai dan tomatnya paling bergantung pada pasokan luar daerah, mengingat cakupan 11 kelompok masih terbatas dibandingkan kebutuhan pasar.

5.2. Rekomendasi Penguatan Sidak Pasar dengan Tindak Lanjut Intervensi Jangka Pendek

Evaluasi menunjukkan intervensi hulu baru berdampak setelah masa panen, sedangkan Sidak Pasar 23 September 2026 mengidentifikasi harga cabai merah keriting naik dari Rp60.000–Rp70.000 menjadi Rp140.000–Rp150.000 per kilogram dan cabai rawit merah menjadi Rp160.000–Rp170.000 per kilogram, serta Minyakita masih di atas HET. Enam langkah tindak lanjut yang direkomendasikan hasil sidak tersebut belum terealisasi pada Triwulan III 2026. Direkomendasikan:

- Melaksanakan operasi pasar murah/pasar penyeimbang untuk cabai merah dan cabai rawit serta komoditas yang harganya bergejolak, bekerja sama dengan Bulog, Perusda Fagogoru Maju Bersama, dan distributor, dengan jadwal yang jelas pada Oktober–November 2026 sebelum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
- Memfasilitasi distribusi dan subsidi ongkos angkut komoditas strategis dari daerah asal (Manado, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Ambon, dan Sorong) melalui kerja sama dengan distributor dan agen, dengan mempertimbangkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana dasar yang digunakan pada pelaksanaan GPM.
- Berkoordinasi dengan Bulog dan distributor untuk memastikan ketersediaan stok Minyakita sesuai HET, mengingat Minyakita masih dijual Rp23.000 per liter karena stok dari Bulog belum tersedia.
- Meningkatkan frekuensi sidak pasar menjadi minimal 1 kali per bulan sebagaimana direkomendasikan pada Triwulan II (pada Triwulan III hanya terlaksana 1 kali pada 23 September 2026), memperluas cakupan ke kecamatan lain dan ke pengecer, serta menambahkan ikan segar dan BBM pada daftar komoditas pantauan.
- Menetapkan batas waktu tindak lanjut hasil sidak (misalnya paling lambat 7 hari setelah sidak) dan menyusun laporan hasil sidak yang memuat harga sebelum dan sesudah, stok, serta tindakan yang dilakukan, agar dampak intervensi dapat diukur pada evaluasi triwulan berikutnya.
- Menggalakkan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah tangga dan kelompok wanita tani sebagai langkah jangka pendek yang melengkapi intervensi hulu Dinas Pertanian.

5.3. Rekomendasi Penguatan Pengendalian Harga BBM dan Biaya Transportasi

Mengingat kelompok transportasi memberikan andil inflasi y-on-y terbesar kedua pada September 2026 (16,69 persen y-on-y, andil 1,64 persen) dengan andil solar meningkat dari

0,32 persen (Agustus) menjadi 0,55 persen (September), sementara penertiban HET BBM hanya dilaksanakan sekali pada 28 Juni 2026 dan tidak ada kegiatan lanjutan pada Triwulan III, direkomendasikan:

- Menjadikan penertiban dan pengawasan HET BBM sebagai kegiatan rutin bulanan oleh Bagian Ekonomi dan SDA dengan cakupan kecamatan yang lebih luas, sebagaimana telah direkomendasikan pada Triwulan II namun belum terlaksana.
- Memperluas pengawasan harga tidak hanya pada BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dexlite), tetapi juga memastikan harga eceran BBM bersubsidi (Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter) tidak melampaui ketentuan di tingkat pengecer.
- Berkoordinasi dengan Pertamina dan agen resmi penyalur BBM untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi, khususnya Biosolar, mencukupi kebutuhan masyarakat dan nelayan di wilayah kepulauan agar mengurangi ketergantungan pada BBM nonsubsidi yang harganya fluktuatif dan mengalami penyesuaian pada awal September 2026.
- Mengkaji dan mengusulkan skema subsidi transportasi/ongkos distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan, sebagaimana direkomendasikan hasil sidak 23 September 2026, termasuk kemungkinan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- Memantau harga BBM dan biaya angkutan secara berkala melalui TPID dan melaporkannya bersama data BPS, mengingat inflasi y-on-y subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi mencapai 24,59 persen pada September 2026.

5.4. Rekomendasi untuk Permasalahan yang Belum Memiliki Kebijakan Penanganan

Sebagaimana diuraikan, terdapat permasalahan hasil identifikasi pada Triwulan III 2026 yang belum memiliki kebijakan penanganan yang secara langsung menyasar stabilisasi harga. Rekomendasi untuk permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Fluktuasi harga hasil laut: ikan cakalang/ikan sisik memberikan andil inflasi y-on-y yang terus naik dari 0,42 persen (Juli) menjadi 0,49 persen (Agustus) dan 0,66 persen (September), namun belum ada kegiatan Perangkat Daerah dan ikan belum masuk daftar pantauan sidak. TPID perlu berkoordinasi dengan Dinas Perikanan untuk memantau harga ikan, musim tangkap, dan biaya operasional nelayan secara berkala, serta menyusun kebijakan yang menyasar stabilisasi harga (bukan sekadar bantuan sosial), misalnya fasilitasi cold storage/gudang pendingin di desa nelayan untuk menyerap hasil tangkapan saat melimpah dan mendistribusikannya saat paceklik.
- Risiko El Niño dan ketergantungan pasokan dari luar daerah: menyusun peta kebutuhan dan ketersediaan stok bahan pokok serta rencana antisipasi (cadangan pangan daerah, jalur pasokan alternatif, dan pemantauan harga di daerah asal pasokan) menghadapi risiko El Niño yang berkepanjangan, dikombinasikan dengan percepatan program produksi lokal pada Poin 5.1 dan perbaikan infrastruktur distribusi (jalan produksi, dermaga/pelabuhan rakyat).
- Persiapan HBKN Natal dan Tahun Baru 2026: menyusun rencana pengamanan stok dan harga bahan pokok (beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang, telur, dan LPG) mulai Oktober 2026 melalui pemantauan harga mingguan, GPM lanjutan, dan operasi pasar, dengan lokasi yang diperluas ke kecamatan yang belum terjangkau GPM pada Agustus 2026.
- Harga emas perhiasan: karena bersumber dari harga emas global dan di luar kendali kebijakan daerah (andil menurun dari 0,22 persen pada Juli menjadi 0,19 persen pada September), TPID cukup melanjutkan pemantauan melalui forum koordinasi tanpa kebijakan intervensi harga, dan mencantumkannya sebagai catatan khusus (bukan target pengendalian) pada laporan triwulan berikutnya.

5.5. Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

- Menjadwalkan Rapat TPID dan/atau rapat koordinasi secara rutin minimal 1 kali per bulan, serta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan rencana aksi yang memuat penanggung jawab, target, dan batas waktu, karena pada Triwulan III tidak tercatat HLM dan HLM Juni 2026 belum menghasilkan tindak lanjut operasional yang terukur.
- Memperbaiki dokumentasi pelaksanaan kebijakan agar memuat data pendukung dampak, antara lain realisasi penjualan per lokasi dan jumlah penerima manfaat GPM (volume tersedia 10 ton beras, 5.000 liter minyak goreng, dan 5.000 kilogram gula pasir, dengan anggaran BTT Rp615.000.000), harga sebelum dan sesudah intervensi, serta capaian produksi program Dinas Pertanian.
- Membangun sistem informasi harga pangan strategis (papan informasi harga/aplikasi sederhana) yang dapat diakses publik dan diperbarui mingguan, sebagai basis data pendukung laporan triwulan berikutnya sekaligus alat deteksi dini bagi TPID, khususnya untuk cabai, minyak goreng, beras, ikan, dan BBM.
- Menyusun kalender kegiatan TPID Triwulan IV 2026 yang memuat kegiatan setiap bulan (tidak ada bulan tanpa kegiatan seperti Juli 2026), sehingga evaluasi dampak dapat dilakukan untuk seluruh kebijakan dengan data BPS bulan sesudahnya.
- Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk Triwulan IV 2026, yaitu target penurunan inflasi y-on-y secara bertahap menuju sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, serta indikator komoditas (harga dan andil cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, beras, dan solar), sebagai acuan evaluasi kinerja seluruh kebijakan yang direkomendasikan di atas.